



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 1809/DJU/TI.1.1/IX/2024 Jakarta, 5 September 2024
Lampiran : 5 (lima) lembar
Hal : Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) tertinggi
dan yang belum mencapai standar nilai EIS
Periode September Tahun 2024

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap pelaksanaan Implementasi SIPP di seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri pada bulan Agustus tahun 2024 berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 478/DJU/TI.1.1/III/2024 Hal Revisi penilaian pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri, dengan ini diumumkan Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus, Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP tertinggi pada 5 (lima) Pengadilan Negeri Klas IA, Pengadilan Negeri Klas IB dan II dengan penilaian tertinggi berdasarkan jumlah beban perkara. Selain itu juga disampaikan daftar pengadilan yang belum mencapai standar minimal nilai Evaluasi Implementasi SIPP untuk menerapkan register elektronik. Kategori penilaian sebagai berikut :

I. PENGADILAN TINGGI :

1. Kinerja

- Rasio penanganan perkara banding
- Jangka waktu penyelesaian perkara banding
- Jangka waktu pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju
- Rasio pendaftaran perkara banding secara elektronik

2. Kepatuhan

- Pelaksanaan verifikasi berkas perkara
- Pendaftaran perkara banding
- Penetapan Majelis Hakim
- Penunjukan Panitera Pengganti
- Input penetapan Majelis Hakim / Hakim
- Input penunjukan Panitera Pengganti
- Verifikasi salinan putusan pada perkara banding elektronik (eCourt)
- Input penetapan hari sidang
- Input pertimbangan hukum
- Input putusan
- Penetapan hari sidang

- Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara

3. Kelengkapan

- Dokumen elektronik putusan
- Prosentase Upload ke Direktori Putusan

II. PENGADILAN NEGERI :

1. Kinerja

- Penyelesaian perkara tepat waktu
- Rilis versi SIPP
- Kesesuaian kode satker nomor perkara
- Jangka waktu pelaksanaan delegasi masuk

2. Kepatuhan

- Pendaftaran perkara
- Pencatatan barang bukti
- Penetapan Hakim
- Penetapan Panitera Pengganti
- Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti
- Penetapan hari sidang pertama
- Penginputan tuntutan
- Pengiriman berkas kasasi
- Pemberitahuan putusan / penetapan
- Penginputan penetapan Majelis/Hakim
- Penginputan penetapan hari sidang
- Penginputan penetapan Jurusita/JSP
- Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi
- Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang
- Kepatuhan Penundaan Perpanjangan Penahanan
- Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara Perdata
- Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara Pidana
- Penginputan putusan akhir
- Penginputan minutasi
- Pelaksanaan minutasi
- Penginputan permohonan banding
- Penginputan permohonan kasasi
- Penginputan permohonan PK
- Pengiriman berkas banding
- Pengiriman berkas PK
- Unggah Putusan Akhir
- Penginputan penetapan PP

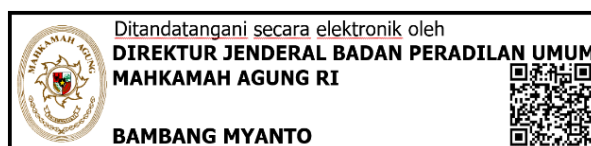
3. Kelengkapan

- E-Document dakwaan/petitum
- Pencatatan saksi
- E-Document tuntutan
- E-Document putusan akhir/penetapan
- Dokumen elektronik berita acara sidang
- Dokumen elektronik relaas panggilan sidang pertama
- Dokumen elektronik rencana persidangan (*Court Callendar*)
- Dokumen elektronik putusan anonimisasi
- Data lapor mediasi
- Data diversi
- Data nilai sengketa

4. Kesesuaian

- Agenda sidang terakhir
- Tanggal putusan dan tanggal sidang terakhir
- Publikasi pihak
- Pengisian BHT
- Penahanan
- Sisa biaya perkara tingkat pertama
- Pelaksanaan sinkronisasi SIPP WEB
- Verifikasi dokumen elektronik elitigasi
- Pelaksanaan sinkronisasi SIPP ke Data Center MARI
- Pengarsipan Perkara

Apresiasi / penghargaan kami sampaikan kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang telah melakukan banyak perbaikan dalam mengimplementasikan SIPP, namun bagi Pengadilan-pengadilan Negeri yang belum mencapai penilaian implementasi SIPP sesuai standar karena hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan agar dapat mendorong perbaikan kinerjanya.



Tembusan:

1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. YM Ketua Kamar Pengawasan;
3. Yth Ketua Kamar Pembinaan;

EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP PENGADILAN TINGGI
PERIODE AGUSTUS TAHUN 2024

I. Nilai Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi dengan Perkara **diatas 1000**

NO	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	TOTAL
1	> 1001	Pengadilan Tinggi Semarang	346.43	550.00	99.69	996.12
2	> 1001	Pengadilan Tinggi Makassar	335.63	550.00	99.17	984.80
3	> 1001	Pengadilan Tinggi Bandung	336.08	548.10	99.03	983.21

II. Nilai Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi dengan Perkara **301 s/d 1000**

NO	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	TOTAL
1	301~1000	Pengadilan Tinggi Jambi	344.51	550.00	100.00	994.51
2	301~1000	Pengadilan Tinggi Pontianak	343.64	550.00	98.46	992.10
3	301~1000	Pengadilan Tinggi Palembang	342.42	548.24	100.00	990.66

III. Nilai Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi dengan Perkara **1 s/d 300**

NO	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	TOTAL
1	1~300	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	345.35	550.00	100.00	995.35
2	1~300	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	342.22	550.00	100.00	992.22
3	1~300	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	339.77	550.00	100.00	989.77

Data ditarik tanggal 2 September 2024 Jam 11.50 WIB

EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP PERIODE AGUSTUS TAHUN 2024

I. Nilai Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus

NO	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL (%)
1	Pengadilan Negeri Palembang	96%	97%	99%	98%	97.57%
2	Pengadilan Negeri Surakarta	96%	99%	96%	98%	97.35%
3	Pengadilan Negeri Sidoarjo	94%	99%	95%	100%	97.06%
4	Pengadilan Negeri Surabaya	93%	97%	98%	99%	96.83%
5	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	94%	93%	98%	99%	95.83%
6	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	92%	95%	96%	98%	95.16%
7	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	92%	97%	94%	97%	94.99%
8	Pengadilan Negeri Tangerang	91%	94%	95%	97%	94.34%
9	Pengadilan Negeri Semarang	93%	95%	90%	97%	93.76%
10	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	87%	96%	96%	95%	93.60%
11	Pengadilan Negeri Bekasi	90%	94%	93%	92%	92.56%
12	Pengadilan Negeri Bandung	94%	93%	89%	90%	91.48%
13	Pengadilan Negeri Medan	91%	89%	81%	92%	88.43%
14	Pengadilan Negeri Makassar	94%	88%	82%	90%	88.31%
15	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	94%	89%	77%	91%	87.75%

II. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara diatas 2000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	>2000	Pengadilan Negeri Pekanbaru	95%	97%	97%	99%	96.93%
2	>2000	Pengadilan Negeri Mojokerto	97%	98%	99%	92%	96.32%
3	>2000	Pengadilan Negeri Jember	95%	98%	93%	96%	95.45%

III. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara diatas 1001 s/d 2000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1001~2000	Pengadilan Negeri Serang	96%	98%	100%	100%	98.55%
2	1001~2000	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	98%	100%	97%	100%	98.52%
3	1001~2000	Pengadilan Negeri Yogyakarta	97%	98%	98%	99%	98.05%

IV. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara diatas 1 s/d 1000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1~1000	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	97%	99%	100%	99%	99.02%
2	1~1000	Pengadilan Negeri Klaten	96%	100%	100%	99%	98.59%
3	1~1000	Pengadilan Negeri Sragen	96%	99%	99%	98%	98.12%

V. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara diatas **1001 s/d 2000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1001~2000	Pengadilan Negeri Bojonegoro	96%	100%	99%	100%	98.72%
2	1001~2000	Pengadilan Negeri Tuban	96%	99%	96%	100%	97.55%
3	1001~2000	Pengadilan Negeri Karawang	95%	99%	97%	99%	97.40%
4	1001~2000	Pengadilan Negeri Jombang	99%	99%	93%	97%	97.12%
5	1001~2000	Pengadilan Negeri Kisaran	96%	99%	96%	96%	96.86%

VI. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara diatas **501 s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501~1000	Pengadilan Negeri Metro	97%	100%	100%	100%	99.15%
2	501~1000	Pengadilan Negeri Madiun	98%	99%	100%	99%	99.12%
3	501~1000	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	96%	100%	100%	100%	98.85%
4	501~1000	Pengadilan Negeri Tabanan	96%	99%	100%	100%	98.72%
5	501~1000	Pengadilan Negeri Kalianda	98%	100%	97%	100%	98.68%

VII. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara diatas **1 s/d 500** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1~500	Pengadilan Negeri Martapura	96%	100%	99%	100%	98.74%
2	1~500	Pengadilan Negeri Bau-Bau	96%	99%	100%	98%	98.34%
3	1~500	Pengadilan Negeri Wates	96%	100%	99%	99%	98.18%
4	1~500	Pengadilan Negeri Wonogiri	97%	99%	98%	98%	98.15%
5	1~500	Pengadilan Negeri Tanjung Selor	96%	99%	97%	99%	97.88%

VIII. Pengadilan Negeri Kelas II dengan perkara diatas **501 s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501 ~ >1000	Pengadilan Negeri Airmadidi	96%	99%	99%	99%	98.24%
2	501 ~ >1000	Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri	96%	99%	98%	98%	97.59%
3	501 ~ >1000	Pengadilan Negeri Sambas	97%	97%	96%	98%	97.05%
4	501 ~ >1000	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	100%	99%	91%	98%	97.04%
5	501 ~ >1000	Pengadilan Negeri Lahat	97%	99%	91%	100%	96.94%

IX. Pengadilan Negeri Kelas II dengan perkara diatas 1 s/d 500 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1~500	Pengadilan Negeri Rantau	96%	99%	99%	100%	98.76%
2	1~500	Pengadilan Negeri Tanjung Redep	96%	99%	99%	100%	98.73%
3	1~500	Pengadilan Negeri Negara	97%	99%	98%	100%	98.67%
4	1~500	Pengadilan Negeri Probolinggo	96%	100%	100%	98%	98.44%
5	1~500	Pengadilan Negeri Tual	98%	99%	99%	98%	98.37%

X. Pengadilan Negeri dengan Nilai Implementasi SIPP Dibawah 90%

NO	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	Pengadilan Negeri Parigi	92%	92%	78%	98%	89.99%
2	Pengadilan Negeri Bengkalis	96%	91%	79%	94%	89.93%
3	Pengadilan Negeri Waingapu	96%	95%	81%	88%	89.86%
4	Pengadilan Negeri Sibuhuan	86%	95%	79%	99%	89.74%
5	Pengadilan Negeri Ende	96%	99%	87%	76%	89.60%
6	Pengadilan Negeri Tarutung	90%	91%	79%	98%	89.44%
7	Pengadilan Negeri Kabanjahe	91%	94%	91%	82%	89.32%
8	Pengadilan Negeri Muara Teweh	94%	97%	79%	89%	89.32%
9	Pengadilan Negeri Padang Sidempuan	93%	92%	81%	90%	89.15%
10	Pengadilan Negeri Rembang	96%	95%	78%	88%	89.11%
11	Pengadilan Negeri Enrekang	96%	98%	68%	92%	88.60%
12	Pengadilan Negeri Medan	91%	89%	81%	92%	88.43%
13	Pengadilan Negeri Makassar	94%	88%	82%	90%	88.31%
14	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	96%	89%	78%	89%	87.96%
15	Pengadilan Negeri Kepahiang	96%	94%	81%	81%	87.93%
16	Pengadilan Negeri Makale	95%	88%	77%	92%	87.88%
17	Pengadilan Negeri Poso	91%	93%	78%	90%	87.88%
18	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	94%	89%	77%	91%	87.75%
19	Pengadilan Negeri Dobo	96%	96%	74%	84%	87.52%
20	Pengadilan Negeri Lasusua	96%	85%	79%	89%	87.34%
21	Pengadilan Negeri Raba/bima	97%	86%	79%	87%	87.22%
22	Pengadilan Negeri Selayar	96%	90%	64%	96%	86.60%
23	Pengadilan Negeri Sintang	96%	88%	65%	96%	86.56%
24	Pengadilan Negeri Bobong	96%	85%	81%	81%	85.91%

N0	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
25	Pengadilan Negeri Sawahlunto	96%	86%	67%	89%	84.44%
26	Pengadilan Negeri Padang	93%	81%	75%	81%	82.30%
27	Pengadilan Negeri Tapaktuan	96%	85%	67%	73%	80.31%
28	Pengadilan Negeri Saumlaki	88%	89%	66%	74%	79.33%
29	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa	96%	79%	59%	69%	75.92%
30	Pengadilan Negeri Kalabahi	37%	64%	59%	47%	51.72%

Data ditarik Tanggal 2 September 2024 Jam 09.05